

KAJIAN IMPLEMENTASI STRATEGI PENGENDALIAN BANJIR DI SUB DAS JENEBERANG HILIR (Studi Kasus Pengendalian Banjir di Kota Makassar)¹

Oleh:
Ryke Nandini

Balai Penelitian Kehutanan Mataram
Jl. Dharma Bakti No. 7, Po Box 1054, Ds. Langko, Kec. Lingsar Lombok Barat –
NTB 83371; Telp. (0370) 6573874, Fax. (0370) 6573841,
e-mail bpkmataram@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kota Makassar sebagai bagian hilir DAS Jeneberang merupakan kota yang sering mengalami banjir. Pengendalian banjir memerlukan keterpaduan semua aspek, baik sipil, teknis maupun kelembagaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji aspek kelembagaan pengendalian banjir yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar melalui kajian terhadap keterkaitan antara strategi pengendalian banjir yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005-2010 dengan implementasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode komparatif dan analisis tupoksi. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidak-sinkronan pada aspek perencanaan yang dituangkan dalam program pengendalian banjir pada RPJMD 2005-2010 dengan implementasi kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Peningkatan kapasitas lembaga pengendali banjir dan peningkatan mekanisme koordinasi antar lembaga melalui pembentukan lembaga atau kelompok kerja pengendali banjir merupakan upaya yang ditawarkan agar kelembagaan pengendali banjir di Kota Makassar dapat lebih berperan dalam perencanaan dan implementasi program pengendalian banjir.

Kata kunci: Pengendalian banjir, RPJMD, SKPD

I. PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang merupakan salah satu DAS kritis yang menjadi prioritas untuk segera ditangani dengan masalah utama banjir, erosi dan sedimen-

¹ Makalah pada Ekspose Hasil-Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Makassar, 22 Juni 2010

tasi. Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang merupakan DAS lintas kabupaten yang wilayahnya antara lain meliputi Kabupaten Gowa dan Sinjai di bagian hulu, serta Kabupaten Takalar dan Kotamadya Makassar di bagian hilirnya. Sebagai bagian dari hilir DAS Jeneberang, Kota Makassar juga tidak lepas dari permasalahan di DAS Jeneberang. Secara fisiografis, letak Kota Makassar adalah pada daerah dataran banjir dan dataran aluvial Sungai Jeneberang, serta sebagian lagi merupakan dataran aluvial pantai dan menjadi *out-let* dari DAS Jeneberang. Adanya Sungai Jeneberang yang membelah Kota Makassar menjadikan Kota Makassar salah satu kota yang sering mengalami banjir setiap musim hujan tiba. Data yang diperoleh menyebutkan bahwa genangan setinggi 30-70 cm hampir selalu terjadi pada lebih dari 40 titik di lebih dari 10 kecamatan (*Kompas*, 10 Nopember 2006).

Terjadinya banjir bukan saja disebabkan oleh adanya masalah pada aspek teknis (infrastruktur), namun juga terkait dengan masalah lingkungan, sosial, ekonomi, perilaku/budaya, dan kelembagaan masyarakat sehingga pengendalian banjir merupakan tanggung jawab semua pihak dan harus dilakukan secara komprehensif. Pemerintah Kota Makassar telah memprioritaskan penanganan masalah banjir, seperti yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005-2010 (Perda Kota Makassar No. 9 Tahun 2006) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2006-2016 (Bappeda Kota Makassar, 2005) yang diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menekankan pada dorongan aspirasi pembangunan masyarakat di Kota Makassar.

Upaya pengendalian banjir telah menjadi prioritas Pemerintah Kota Makassar, namun dari tahun ke tahun kejadian banjir masih sering terjadi di Kota Makassar. Seiring dengan kejadian tersebut, maka evaluasi perlu dilakukan untuk melihat bagaimana upaya pengendalian banjir tersebut dari sisi perencanaan dan implementasinya. Salah satunya adalah dengan melihat keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Makassar dalam pelaksanaan strategi pengendalian banjir yang telah dituangkan dalam RPJMD sebagai dokumen perencanaan.

Tulisan ini mencoba mengkaji keterkaitan antara strategi pengendalian banjir yang tercantum dalam dokumen RPJMD

Kota Makassar Tahun 2005-2010 dengan implementasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD di Kota Makassar. Data diperoleh antara lain dari hasil wawancara terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan banjir dan pengendalian banjir di Kota Makassar yang antara lain adalah informan kunci dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dan kecamatan se-Kota Makassar, serta analisis dokumen perencanaan pengendalian banjir yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2005-2010. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode komparatif dan analisis tupoksi.

Hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan bagi perbaikan perencanaan strategi pengendalian banjir yang dilakukan di Kota Makassar sebagai bagian dari sub DAS Jeneberang Hilir sehingga Kota Makassar dapat terbebas dari banjir.

II. KARAKTERISTIK BANJIR DI KOTA MAKASSAR

Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan genangan (Nandini, 2007), Kota Makassar terdiri dari dua macam kelas kerawanan terhadap genangan, yaitu kelas rawan seluas 14.161,1 ha dan kelas sangat rawan seluas 3.275,9 ha. Daerah dengan kelas rawan tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar. Daerah tersebut secara fisik mempunyai geomorfologi terdiri dari bentuk lahan dataran, dataran aluvial, pantai, rawa, dan sabuk *meander*; jenis tanah Entisol dan Inceptisol; serta penggunaan lahan pemukiman, pertanian lahan kering, sawah, padang rumput, tubuh air, dan tambak. Daerah yang termasuk dalam kelas sangat rawan hanya berada pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Biringkanaya. Daerah ini secara fisik mempunyai geomorfologi terdiri dari bentuk lahan dataran dan dataran alluvial, jenis tanah Ultisol dan Inceptisol, serta penggunaan lahan rawa, sawah, tubuh air, dan tambak. Berdasarkan hasil inventarisasi, ketinggian genangan bervariasi antara 15-150 cm dengan lama genangan 2-10 jam, tergantung besar dan intensitas hujan yang terjadi.

Kota Makasar hampir selalu mengalami banjir pada saat musim hujan tiba. Menurut informasi Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

Wilayah IV Makassar, curah hujan dengan tebal 100 mm atau lebih dapat dipastikan akan menimbulkan genangan di berbagai tempat di Kota Makassar, di samping akibat pengaruh aliran balik (*back water*) pada saat terjadinya pasang surut air laut. Kejadian banjir tidak lepas dari adanya konsentrasi aliran permukaan yang tidak dapat meresap ke dalam tanah akibat perubahan penutup lahan. Hasil analisis aliran permukaan di Kota Makassar menunjukkan bahwa aliran permukaan yang terjadi adalah 0-53 mm. Aliran permukaan terbesar sebagian besar terkonsentrasi pada daerah pusat kota di mana secara umum daerah-daerah tersebut merupakan lahan terbangun dengan kepadatan tinggi, baik perumahan, pertokoan maupun perkantoran.

Banjir yang terjadi di Kota Makassar juga dipengaruhi oleh letak Kota Makassar yang hanya berada pada ketinggian sekitar 0-6 m dpl sehingga mudah tergenang oleh aktivitas pasang air laut, terutama pada saat pasang mencapai titik tertinggi. Menurut Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin (2006), tipe pasang surut di Kota Makassar adalah campuran yang condong ke harian tunggal (*mixed tide prevailing diurnal*), yaitu dalam satu hari terdapat satu kali air tinggi dan satu kali air rendah yang tidak beraturan dengan perbedaan air tinggi dan air rendah rata-rata saat purnama adalah 140 cm. Faktor kemiringan lereng yang kecil menyebabkan naiknya air pasang dengan cepat menggenangi sebagian wilayah Kota Makassar yang berakibat pada banjir di Kota Makassar.

III. STRATEGI PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA MAKASSAR

Strategi pengendalian banjir di Kota Makassar telah disusun dan dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2005-2010. Berdasarkan hasil analisis pada dokumen tersebut diperoleh bahwa terdapat lima strategi pengendalian banjir yang akan dilakukan, yaitu pengendalian tata ruang, pengaturan debit banjir, pengaturan daerah rawan banjir, peningkatan peran masyarakat, serta pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA). Pelaksanaan strategi pengendalian banjir tersebut dilakukan secara teknis dan non teknis. Secara teknis, strategi pengendalian banjir yang

dilakukan adalah pengaturan debit banjir, dalam hal ini dilakukan dengan pembuatan dan pemeliharaan saluran drainase, normalisasi saluran drainase, waduk tunggu, dan pemompaan kanal. Secara non teknis strategi pengendalian banjir yang dilakukan adalah pengendalian tata ruang, pengaturan daerah rawan banjir, peningkatan peran masyarakat, serta pengelolaan DTA. Pada umumnya pelaksanaan strategi pengendalian banjir di Kota Makassar tersebut dilakukan pada daerah-daerah yang merupakan titik-titik rawan genangan dan telah melibatkan kecamatan-kecamatan dalam berbagai kegiatan pengendalian banjir. Adapun rincian pelaksanaan strategi pengendalian banjir tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan strategi pengendalian banjir di Kota Makassar

No	Strategi pengendalian banjir	Kegiatan pengendalian banjir	Lokasi
1	Pengaturan debit banjir	Pembuatan dan pemeliharaan saluran drainase	Makassar bagian barat dan timur
		Normalisasi saluran drainase	Saluran drainase utama Panampu, Jongaya, Sinrijala
		Waduk tunggu	Pampang
		Pemompaan kanal	Kanal Panampu dan Jongaya
2	Pengendalian tata ruang	Pengaturan tata-guna lahan	Kawasan lindung di Kota Makassar
3	Pengaturan daerah rawan banjir	Manajemen sampah	14 kecamatan di Kota Makassar
4	Pengelolaan Daerah Tangkapan Air	Pengelolaan DAS	Bagian hulu DAS Jeneberang (Kab. Gowa), jalan-jalan protokol pada 14 kecamatan di Kota Makassar, desa-desa nelayan di sepanjang pantai Makassar
5	Peningkatan peran masyarakat	Peringatan bahaya banjir	14 kecamatan di Kota Makassar
		Informasi publik dan penyuluhan	14 kecamatan di Kota Makassar

Sumber: Analisis data (2007)

Hasil kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan strategi pengendalian banjir di atas diketahui adanya sejumlah kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain karakteristik aliran permukaan yang besar, saluran drainase yang belum memadai, pemanfaatan lahan-lahan yang rawan banjir, perubahan fungsi kawasan, dan kelembagaan. Adapun hasil kajian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Evaluasi pengendalian banjir di Kota Makassar

No	Kegiatan pengendalian banjir	Implementasi kegiatan	Hasil evaluasi
1	Pembuatan dan pemeliharaan saluran drainase	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan saluran drainase sekunder dan tersier oleh Dinas PU dan Dinas PLH & K Kota Makassar, drainase primer oleh Dinas PSDA Provinsi Sulsel - Pemeliharaan tidak rutin dan menyeluruh - Partisipasi masyarakat kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala SDM, dana, dan pembagian kewenangan - Saluran drainase yang ada tidak mampu menampung aliran permukaan yang terjadi - Kurangnya kesadaran masyarakat
2	Normalisasi saluran drainase	<ul style="list-style-type: none"> - Normalisasi dilakukan dengan pengerukan sedimentasi - Pengerukan tidak rutin 	Terkendala SDM, dana, dan pembagian kewenangan
3	Waduk tunggu	Pembangunan waduk tunggu Pampang	Berhasil mengurangi banjir di Kota Makassar bagian timur
4	Pemompaan kanal	Pemasangan pompa di Kanal Jongaya dan Panampu	Berhasil mengurangi intensitas banjir di sepanjang kanal
5	Pengaturan tata guna tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan areal perlindungan dan kawasan resapan air di Daerah Antang - Terdapat beberapa pergeseran pemanfaatan ruang dari arahan yang terdapat dalam RTRWK - Pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan rawa sebagai resapan air cukup berhasil sebagai pengendali banjir - Penggunaan rawa sebagai areal tambak telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat

No	Kegiatan pengendalian banjir	Implementasi kegiatan	Hasil evaluasi
		lahan-lahan yang rawan banjir yang tidak sesuai dengan fungsinya	- Kurangnya kontrol dalam pelaksanaan RTRW
6	Manajemen sampah	- Dilakukan oleh Dinas PLH & K dan Prusda Kebersihan sesuai Perda No. 14 Tahun 1999 - Partisipasi masyarakat dalam kebersihan cukup baik	Keefektifan pelaksanaan Perda baru 20%, pelayanan kebersihan mencapai 87,76%,
7	Pengelolaan DAS	- Penanaman jalur hijau dan rehabilitasi mangrove oleh instansi vertikal maupun horisontal - Banyak tanaman yang mati	- Tanaman kurang pemeliharaan - Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan tanaman kurang
8	Peringatan bahaya banjir	Dilakukan pada tiap kecamatan dengan koordinasi dinas terkait	Kesadaran untuk siaga banjir, baik
9	Informasi dan penyuluhan	Dilakukan pada tiap kecamatan dengan koordinasi dinas terkait	Partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan cukup baik

Sumber: Analisis data (2007)

IV. KETERKAITAN RPJMD KOTA MAKASSAR DENGAN IMPLEMENTASI PROGRAM SKPD DALAM PENGENDALIAN BANJIR

Dalam dokumen RPJMD Kota Makassar 2005-2010 telah dicantumkan lima strategi pengendalian banjir di Kota Makassar, yaitu pengendalian tata ruang, pengaturan debit banjir, pengaturan daerah rawan banjir, peningkatan peran masyarakat, serta pengelolaan DTA. Program-program tersebut terbagi merata kepada SKPD-SKPD yang ada di Pemerintah Kota Makassar sebagai pelaksana sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Hasil analisis tupoksi menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tujuh SKPD yang terkait tupoksinya terhadap kegiatan pengendalian banjir di Kota Makassar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu Bappeda, Dinas Kelautan dan Ke-

tahanan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Adapun uraian tupoksi SKPD tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sesuai dengan tugas pokok masing-masing SKPD, maka setiap instansi akan menyusun berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya yang diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu program pengendalian banjir di Kota Makassar secara terpadu. Masing-masing program yang akan dilakukan oleh SKPD-SKPD tersebut terikat oleh kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam rangka mencapai visi Kota Makassar. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2005-2010 dan hasil wawancara dengan pimpinan Bappeda Kota Makassar, program pengendalian banjir di kota Makassar terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan, tata ruang dan lingkungan yang terbagi menjadi empat program utama dan 24 program yang dilaksanakan oleh lima instansi. Adapun program-program yang terkait dengan pengendalian banjir tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Program-program yang terkait dengan pengendalian banjir

No	Program utama	Program	SKPD
1	Penataan ruang	Perencanaan tata ruang	Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Bangunan
		Pemanfaatan ruang	Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Kecamatan
2	Peningkatan infrastruktur kota	Pembangunan drainase/gorong-gorong	Dinas PU, Kecamatan
		Pembangunan turap talud dan bronjong	Dinas PU
		Rehabilitasi/pemeliharaan turap talud dan bronjong	Dinas PU
		Rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas PU, Kecamatan
		Pengembangan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Dinas PU
		Pengendalian banjir	Dinas PU

No	Program utama	Program	SKPD
3	Pengelolaan lingkungan hidup	Pembangunan kinerja pengelolaan persampahan	Dinas PLH & K, Kecamatan
		Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dinas PLH & K
		Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Dinas PLH & K
		Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Dinas PLH & K
		Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Dinas PLH & K
		Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Dinas PLH & K
		Pengelolaan ruang terbuka hijau	Dinas PLH & K
		Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Dinas PLH & K
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Pengembangan data dan informasi perencanaan	Bappeda
		Perencanaan pengembangan kota	Bappeda
		Perencanaan sosial dan budaya	Bappeda
		Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Bappeda
		Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Bappeda
		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	Bappeda
		Pengelolaan areal tanah	Bappeda
		Optimalisasi pemanfaatan informasi dan teknologi	Bappeda

Sumber: RPJMD Kota Makassar 2005-2010

Tabel 3 menunjukkan bahwa SKPD yang banyak terlibat dalam pengendalian banjir secara teknis adalah Bappeda,

Dinas Tata Ruang dan Bangunan, serta Dinas Pekerjaan Umum. Instansi yang terlibat dalam pengendalian banjir secara non teknis adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan (PLH&K) dan Kecamatan. Hasil analisis dapat pula diketahui bahwa ternyata ada beberapa instansi yang menurut tugas pokoknya terkait dengan pengendalian banjir namun ternyata tidak tercantum sebagai pelaksana program pengendalian banjir yang telah dirumuskan, di antaranya Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, serta Dinas Sosial. Namun demikian berdasarkan informasi dari instansi-instansi tersebut, mereka juga mempunyai beberapa kegiatan yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan program tersebut seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang menjadi salah satu fasilitator dalam pembentukan posko pengendalian bencana pada tingkat kecamatan, meskipun posko yang dibentuk tidak secara khusus ditujukan pada bencana banjir.

Keputusan suatu SKPD untuk dapat berperan dalam program pengendalian banjir seringkali bukan menjadi kapasitas SKPD untuk mengusulkan atau menerima program namun telah menjadi keputusan yang diambil oleh para pengambil kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Salah satu alasan yang disampaikan oleh *informan* kunci dari beberapa SKPD mengenai pembagian dan pelaksanaan program pengendalian banjir ini antara lain disebabkan adanya keterbatasan dana kegiatan yang dialokasikan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap tupoksi SKPD yang berkaitan dengan pengendalian banjir juga menyebabkan program dan kegiatan pengendalian banjir bukan menjadi salah satu prioritas bagi SKPD terkait.

V. PENUTUP

Pengendalian banjir memerlukan pendekatan yang integratif dari berbagai bidang. Dari sisi kelembagaan, ketidaksinkronan antara program pengendalian banjir seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Makassar tahun 2005-2010 dengan implementasi kegiatan pengendalian

banjir menyebabkan pengendalian banjir yang dilakukan pada tingkat SKPD di Kota Makassar menjadi kurang optimal dan belum memberikan hasil yang signifikan. Pengendalian banjir di Kota Makassar memerlukan upaya sinkronisasi antar lembaga yang terkait dalam kegiatan pengendalian banjir. Pemahaman terhadap tupoksi masing-masing SKPD merupakan langkah awal untuk menyusun berbagai kegiatan pengendalian banjir di tingkat SKPD. Peningkatan kapasitas aparat dalam pemahaman terhadap tupoksinya merupakan salah satu program yang dapat dilaksanakan di setiap SKPD. Selain itu diperlukan pula adanya mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam kegiatan pengendalian banjir agar pelaksanaannya tidak tumpang-tindih dan masing-masing lembaga yang terlibat dapat menjalankan tupoksinya dengan benar. Pembentukan suatu lembaga atau kelompok kerja untuk pengendalian banjir merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjembatani masalah koordinasi. Salah satu upaya telah dilakukan yaitu dengan pembentukan Forum DAS Jeneberang yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi dan *stakeholder* yang terkait dengan DAS Jeneberang. Namun demikian lembaga ini belum dapat berperan secara formal khususnya menyangkut perencanaan pengendalian banjir di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas. 2006. Daerah Resapan Tertutup, Makassar Rawan Banjir. 10 November 2006.
- Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin. 2006. Dampak Pembangunan Ruko dan Perumahan terhadap Terjadinya Banjir di Kota Makassar. Laporan Penelitian. Makassar.
- Nandini, R. 2007. Permasalahan Ruang dan Manajemen Pengendalian Banjir di Kota Makassar. Tesis S2. Universitas Hasanuddin Makassar. Tidak dipublikasikan.
- Perda Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- _____. Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar.

-
- Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sosial Kota Makassar.
-
- Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
-
- Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
-
- Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan penanggulangan Bencana Kota Makassar.
-
- Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar.
-
- Nomor 9 Tahun 2006 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005-2010.

Lampiran 1. Tugas pokok SKPD yang terkait dengan pengendalian banjir di Kota Makassar

No	Instansi	Dasar hukum	Tugas pokok	Penanggung jawab
1	Bappeda	Perda No. 6 tahun 2005	Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang prasarana dan sarana perkotaan, tata ruang dan lingkungan hidup.	Bidang Fisik dan Prasarana
			Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan penelitian pengembangan daerah serta penyusunan statistik dan pelaporan	Bidang Litbangda
2	Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan (Dinas K & KP)	Perda No. 15 tahun 2005	Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, pengolahan hasil dan tata niaga pada bidang tanaman pangan dan kehutanan.	Bidang Ketahanan Pangan dan Kehutanan
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Dinas PK & PB)	Perda No. 27 tahun 2005	Melaksanakan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan realokasi akibat bencana, pengarahannya dan pengendalian sumberdaya, menyiapkan peralatan untuk keperluan penanggulangan bencana	Bidang Penanggulangan Bencana
4	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan (Dinas PLH & K)	Perda No. 28 tahun 2005	Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis penanganan Amdal, menganalisis dokumen UKL/UPL serta penerbitan perizinan dan penataan hukum lingkungan	Bidang Pengendalian Lingkungan
			Melaksanakan pengawasan dan pengendalian air dan laut, tanah serta kerusakan lingkungan hidup serta pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan	Bidang Pengawasan dan Pemantauan

No	Instansi	Dasar hukum	Tugas pokok	Penanggung jawab
			Melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah dan limbah lingkungan, pengendalian dan penertiban pengelolaan kebersihan lingkungan serta pemeliharaan peralatan operasional	Bidang Pengelolaan Kebersihan
			Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman dan lampu hias serta pembibitan dan penghijauan kota	Bidang Dekorasi Kota
5	Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU)	Perda No. 25 tahun 2005	Melaksanakan pelayanan teknis di bidang pengelolaan perumahan, pembinaan terhadap pengusaha, pengembang perumahan/pengelola pengusaha rumah sewa/kost serta pengawasan dan penertiban penghunian perumahan dan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung-gedung dan bangunan milik Pemerintah	Bidang Perumahan dan Bangunan
			Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta air bersih pada lingkungan perumahan dan pemukiman	Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan
			Melaksanakan survey perhitungan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan termasuk	Bidang Jalan dan Jembatan
			melaksanakan survey perhitungan rencana pembangunan dan pemeliharaan drainase	Bidang Bangunan Air

No	Instansi	Dasar hukum	Tugas pokok	Penanggung jawab
6	Dinas Sosial	Perda No. 22 tahun 2005	Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin serta bantuan kepada korban bencana dan musibah lainnya	Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
7	Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Dinas TR & B)	Perda No.24 tahun 2005	Melaksanakan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bidang Perencanaan Tata Ruang
			Melaksanakan pengendalian penataan ruang	Bidang Pengendalian Kawasan
			Penertiban dan pertimbangan izin-izin mendirikan bangunan, memberikan petunjuk teknis tentang perizinan	Bidang Perizinan Bangunan
			Melaksanakan pengusutan, penertiban bangunan dan menangani sengketa bangunan	Bidang Penertiban dan Pengusutan
8	Kecamatan	Perda No.29 tahun 2005	Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Ketenetraman dan Kertertiban Umum c. Seksi Kesejahteraan Sosial d. Seksi Pembangunan